



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**CfDS**  
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY

# Progress Capaian Arsitektur SPBE & Peta Rencana v2 Rencana Integrasi Layanan Digital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Daring, 23 Mei 2023



<https://tinyurl.com/PaparanReviuSulbar2023>





# Nanang Ruswianto, S.T, M.Kom

Koordinator **Evaluator SPBE** UGM (KemenPANRB) - UGM (2018-skrng)

**Peneliti Smart City & SPBE**, CFDS - Fisipol UGM (2018-sekarang)

Tim Koordinasi **Jogja Smart Province DIY (2018-sekarang)**

**IT Konsultan** (unit usaha UGM) sejak (2004 - sekarang)

CFDS Focus Area:

1. Digital Governance, including:
  1. Social Media and Politics
  2. E-democracy/digital democracy
  3. digital literacy for government
  4. eGovernment (SPBE)
2. Digital Economy, including
  1. Small and Medium Enterprises (SMEs) go online
  2. Financial Technology
  3. Development of e-commerce
3. Future Technology
  1. Artificial Intelligence
  2. Cloud Computing
  3. Data Analytics



Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada adalah pusat kajian yang berfokus dalam isu masyarakat digital. Didirikan pada tahun 2015, CfDS UGM berdiri di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.



# KETERPADUAN DALAM PENYELENGGARAAN SPBE

Diperlukan Komitmen dan Pengawasan Serious

Pimpinan Mengawal Keterpaduan



Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai pedoman keterpaduan

- Integrasi dan keselarasan proses bisnis pemerintahan
- Integrasi dan keselarasan data
- Integrasi dan keselarasan pembangunan aplikasi
- Integrasi infrastruktur TIK



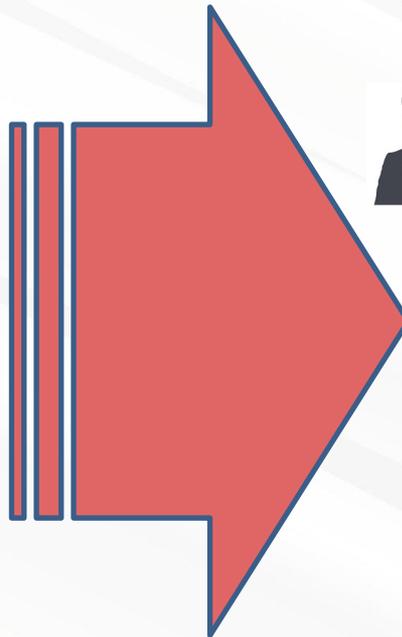
Data dan Informasi SPBE yang terintegrasi dan terpadu

- Berbagi pakai data dan informasi
- Penyediaan akses data dan informasi
- Pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi



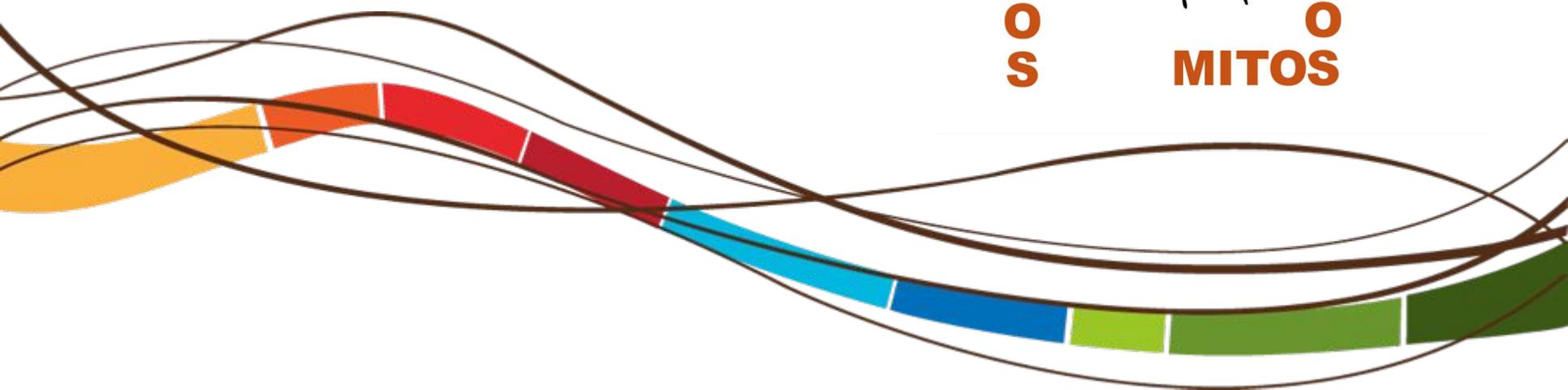
Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

- Pembangunan infrastruktur TIK
- Pembangunan aplikasi
- Perencanaan SDM SPBE
- Perencanaan program kegiatan SPBE



Penguatan Koordinasi antar Perangkat Daerah yang terpadu

- Koordinator SPBE Pemda
- Koordinator Kelompok Kerja SPBE
- Pimpinan/Sekretaris Perangkat Daerah



SPBE

M  
I  
MITOS  
O  
S



MITOS  
I  
T  
O  
MITOS

# MITOS yang Harus Dilupakan OPD



#1

“Menganggap bahwa **SPBE** hanya merupakan pembangunan/pengembangan aplikasi”



Proses Bisnis, Layanan,  
Kebijakan, Perencanaan,  
Pengelolaan

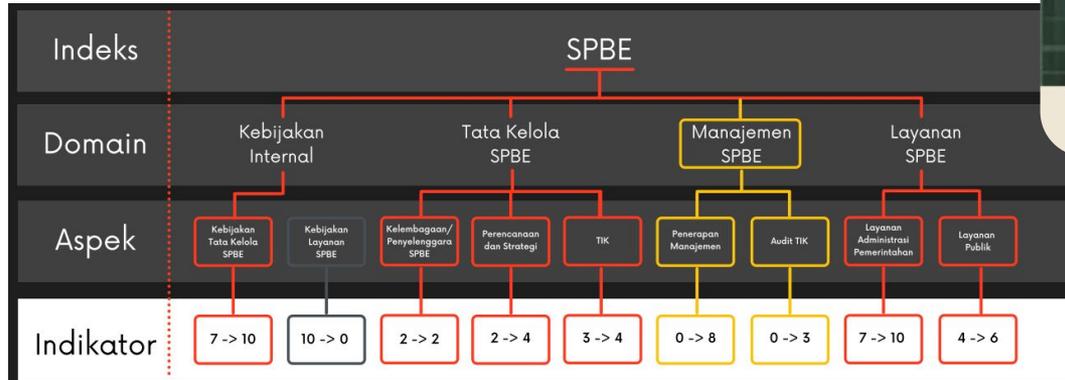


# MITOS yang Harus Dilupakan OPD



#2

“Menganggap **SPBE** semata-mata hanya menjadi **tanggung jawab unit kerja** yang terkait dengan **TIK**, sehingga enggan berpartisipasi dan melakukan kolaborasi penerapan SPBE”



47 Indikator

32 urusan

Padahal urusan bidang semua ada di OPD (terkait dengan Pemerintahan, Permendagri 90, 2019)

# MITOS yang Harus Dilupakan OPD



#3

“Mengasumsikan bahwa penerapan SPBE memerlukan **pembentukan unit kerja baru**”



## MITOS yang Harus Dilupakan OPD



#4

“Menganggap bahwa kebijakan SPBE **menambah rantai birokrasi** bagi Pemda”



# MITOS yang Harus Dilupakan OPD



#5

“Menganggap **Evaluasi SPBE** sebagai ajang Penilaian Semata (**Administratif**)”



# MITOS yang Harus Dilupakan OPD



“Menganggap setelah pada **index tinggi** kemudian **bersantai**”

#6



## MITOS yang Harus Dilupakan OPD



#7

“Menganggap bahwa melaksanakan **SPBE** harus menggunakan **anggaran tambahan** yang dialokasikan **khusus**”

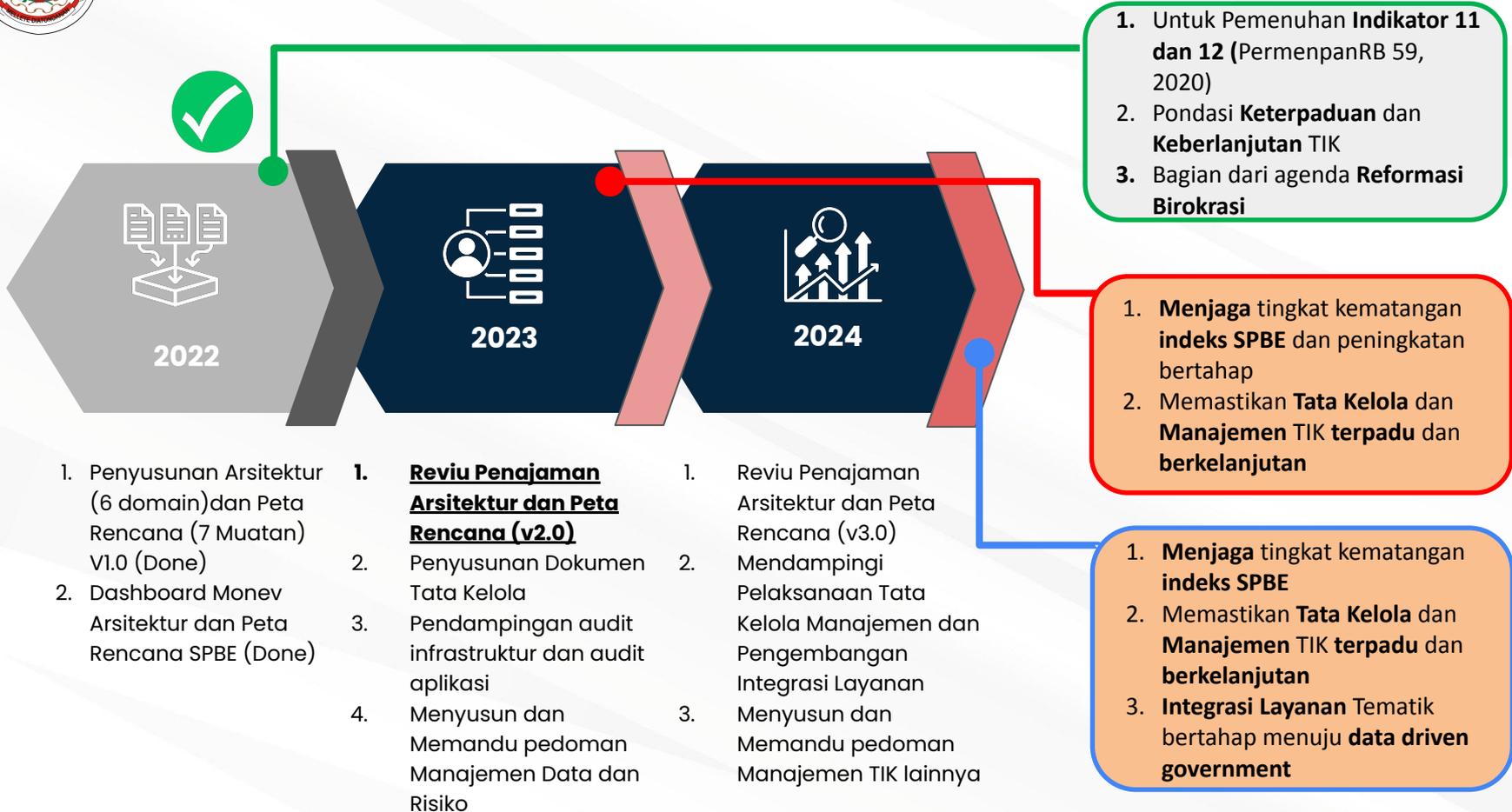


SPBE dijalankan untuk keberlanjutan pemerintahan dan peningkatan layanan terbaik untuk masyarakat, anggaran khusus adalah “suplemen”



# PERJALANAN MOU CFDS UGM Dengan Pemprov Sulbar

## Dalam Penyelenggaraan SPBE



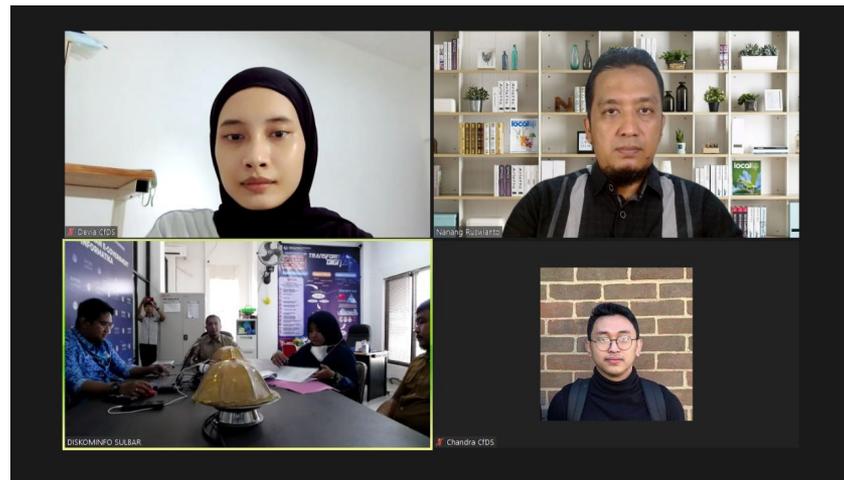


# DOKUMENTASI KEGIATAN (jan-feb 2023)



Selasa, 10 Januari 2023 | Dikbud

42 OPD sudah melakukan penajaman



Selasa, 17 Januari 2023 | BPKPD

SULBAR\_Metadata\_Arsitektur\_DinasKelautanPerikanan

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help Last edit was 6 minutes ago

100% You are screen sharing Stop sharing

Non Tender (Pengadaan Langsung)

No	Nama Bisnis/Usuan	Uraian Proses Bisnis	-- RAB Level 1 Nasional (Dependency)	-- RAB Level 2 (Dependency)	Instansi
1	Pengadaan Tender	Subah proses pembelian penyedia barang dan jasa dengan persyaratan dan kualifikasi tertentu	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Non Tender (Pengadaan Langsung)	Subah proses pembelian penyedia barang dan jasa oleh pejabat pengadaan tanpa melalui proses pelelangan atau seleksi	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Layanan Informasi data	Pelaporan produksi kelautan dan perikanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Layanan informasi data pelaku kerelayanan	Inventarisasi pelaku usaha perikanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Layanan informasi pengendalian residu	Pelaporan hasil pengambilan sampel udang	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Layanan informasi pemantauan penyakit ikan	Pelaporan hasil pengujian sampel penyakit ikan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan)	Profil dan jumlah pelabuhan perikanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	SIMKADA (Sistem Informasi Kapal Daerah)	Jumlah Izn SIPI (Surat Izn Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izn Kapal Pengangkut Ikan), SILP (Surat Izn Usaha Penangkapan Ikan), STKA (Surat Tanda Kapal Andon), TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan)	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Pengelolaan Ruang Laut Sampal Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
10	Layanan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Layanan Pengelolaan Kawasan Konsevasi di Wilayah Pesisir dan	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
12					

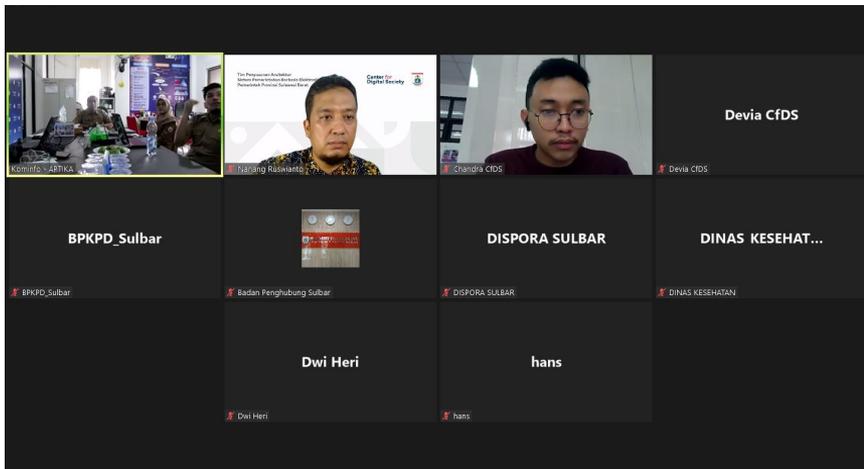


Selasa, 24 Januari 2023 |  
Dinas Kelautan & Perikanan

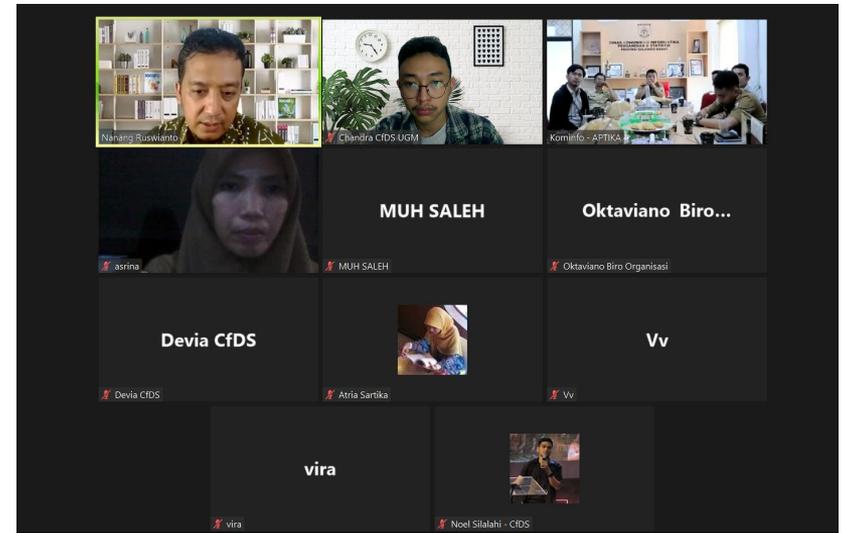


Chandra CfDS

Selasa, 31 Januari 2023 | Dinas Kehutanan



Selasa, 7 Februari 2023 |  
Dinas Perkebunan & DLH



Selasa, 14 Februari 2023 | Kelompok 1



SULBAR\_New Isian Gabungan Kolom Abacus

K21	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Instansi	Akronim	PIC	Tgl Penajaman	STATUS	D-Layanan	D-Probis	D-Data	D-Aplikasi	Link File
16	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	ESDM		21 February 2023						https://docs.google.com/document/d/17z3hZ0F1E...
17	Dinas Kehutanan	Dishut	Siti Nabila	31 January 2023	OK	OK	OK	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1M7WkH4V0V...
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	DKP	Rusman	24 January 2023	OK	OK	OK	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1y3jyC0q0p05...
19	Dinas Kesehatan	Diskas		14 February 2023	OK	OK	OK	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1K5Gw92c...
21	Dinas Ketahanan Pangan	Ketapang		14 February 2023		BELUM	BELUM	BELUM	BELUM	https://docs.google.com/document/d/1knpyz2IA507...
21	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik	Diskominfo Pers		21 February 2023						
22	Dinas Lingkungan Hidup	DLH	Icaik	7 February 2023	OK	OK	OK	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1DWW0IC1B8...
24	Dinas Pariwisata	Dispar		21 February 2023						
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR		14 February 2023	OK	OK	OK	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1SDUj5Eg7L1E...
37	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dispora		28 February 2023						https://docs.google.com/document/d/1A0C9U4949...
27	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	DPMPPTSP		14 February 2023		BELUM	BELUM	BELUM	BELUM	https://docs.google.com/document/d/1GAW7P8b5u...
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DINBUD	Nurhalisa	10 January 2023	OK	OK	OK	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1Sx2Zr1D3S...
30	Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil*	Dukcapil		14 February 2023		OK	BELUM	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1nvt0QhZw83...
32	Dinas Perhubungan	DISHUB								
22	Dinas Perkebunan	Disbun	Awal	7 February 2023		OK	BELUM	OK	BELUM	https://docs.google.com/document/d/1GzZr9JAL...
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpus		21 February 2023						https://docs.google.com/document/d/1GzZr9JAL...

Selasa, 21 Februari 2023 | Kelompok 3



Recording:

<https://drive.google.com/drive/folders/12WGEcawHm0INTELzOMN7LCjFwXJYzEzb?usp=sharing>



Sulbar\_Penajaman Data OPD [Khusus]

Cascading | Ilustrasi

Visi -> Misi -> Sasaran -> Program Strategis (Kesehatan)

**Layanan Kesehatan**  
Layanan kesehatan kepada seluruh kalangan masyarakat

**Proses Bisnis untuk mendukung Layanan Kesehatan**  
Mempersiapkan Kegiatan Sosial Lingkungan  
Memastikan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan  
Melakukan Pengantaran 24 jam Layanan Primer

**Data yang dikelola di setiap Proses Bisnis**  
Pasien,  
Faskes,  
Obat,  
Limbah Kesehatan dll

Apresiasi Penda SPQDT, SIMRS, S...

Click to add speaker notes

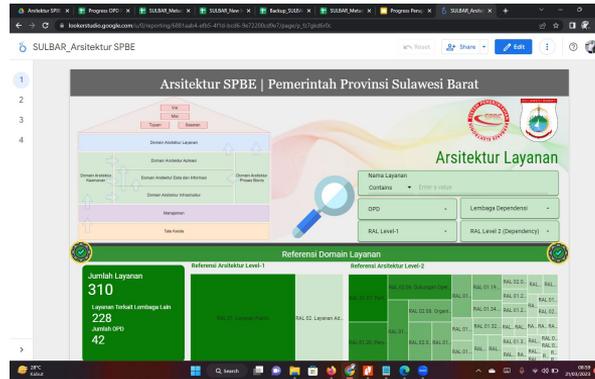
Selasa, 28 Februari 2023 | Kelompok 4

# Tindak Lanjut Penajaman Arsi SPBE:

1. Finalisasi dashboard Arsi (“bungkus v2.0”)
2. Finalisasi 2 Domain Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan (<https://tinyurl.com/ArsiSulbar56>)
3. Mempersiapkan metadata baru v 2.0 untuk lampiran data dukung evaluasi 2023.

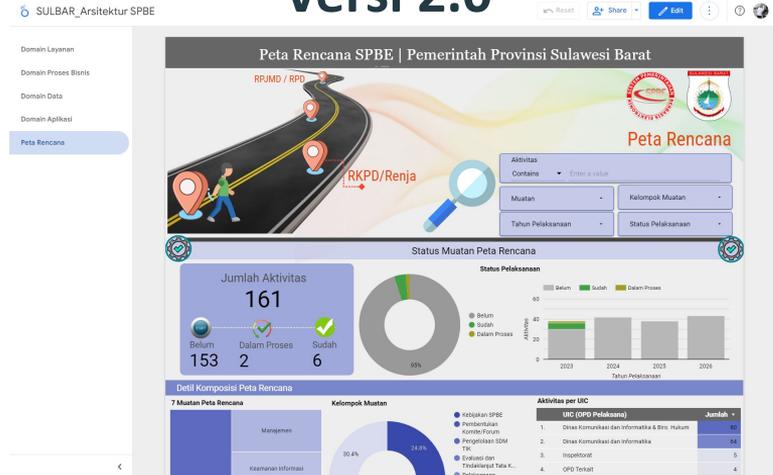


## Versi 1.0



<https://s.id/SulbarArsitekturSPBEv1>

## Versi 2.0



<https://s.id/SulbarArsitekturSPBE>



# Versi 1.0

## Jumlah Layanan Terkait Lembaga Lain

	Kementerian/Lembaga Terkait	Jumlah Layanan ▾
1.	null	<div style="width: 100%;"></div>
2.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Repu...	<div style="width: 80%;"></div>
3.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<div style="width: 60%;"></div>
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<div style="width: 40%;"></div>
5.	Kementerian Pertanian	<div style="width: 30%;"></div>
6.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ...	<div style="width: 20%;"></div>
7.	Kementerian Dalam Negeri	<div style="width: 15%;"></div>
8.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	<div style="width: 10%;"></div>
9.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	<div style="width: 5%;"></div>

1 - 26 / 26 < >

## Jumlah Layanan per OPD

	Perangkat Daerah	Jumlah Layanan ▾
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	144
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	94
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Pend...	89
4.	Dinas Kehutanan	74
5.	Dinas Perkebunan	66
6.	Dinas Lingkungan Hidup	60
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan ...	52
8.	Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil	51
9.	Badan Kependidikan Daerah	49

1 - 42 / 42 < >

# Versi 2.0

## Jumlah Layanan Terkait Lembaga Lain

	Kementerian/Lembaga Terkait	Jumlah Layanan ▾
1.	null	<div style="width: 100%;"></div>
2.	Kementerian Pertanian RI	<div style="width: 80%;"></div>
3.	Dewan Perwakilan Rakyat RI	<div style="width: 60%;"></div>
4.	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	<div style="width: 40%;"></div>
5.	Kementerian Pariwisata	<div style="width: 30%;"></div>
6.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	<div style="width: 20%;"></div>
7.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<div style="width: 15%;"></div>
8.	Kementerian Pertanian	<div style="width: 10%;"></div>
9.	Kementerian Desa	<div style="width: 5%;"></div>

1 - 26 / 26 < >

Sebaran Layanan terlihat lebih rasional

	Perangkat Daerah	Jumlah Layanan ▾
1.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	34
2.	Sekretariat DPRD	24
3.	Rumah Sakit Umum Regional Daerah	19
4.	Dinas Pariwisata	14
5.	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik	9
6.	Biro Organisasi dan tata laksana	8
7.	Dinas Transmigrasi	7
8.	Biro Pemerintahan dan Kesra	7
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan D...	7

1 - 42 / 42 < >

# Versi 2.0

## Referensi Domain Layanan

Jumlah Layanan

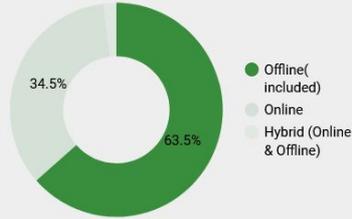
162

Layanan Terkait Lembaga Lain

140

Jumlah OPD

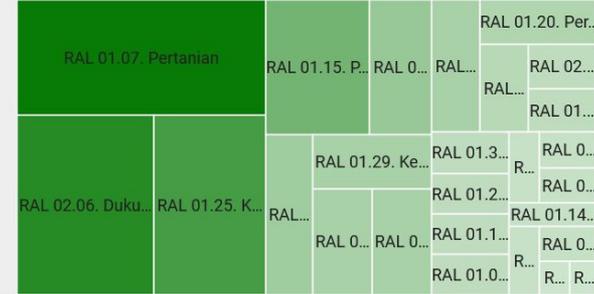
24



### Referensi Arsitektur Level-1



### Referensi Arsitektur Level-2



# Versi 2.0

Masih ada pekerjaan rumah untuk memastikan tipe layanan yang ada

## Referensi Domain Layanan

Jumlah Layanan

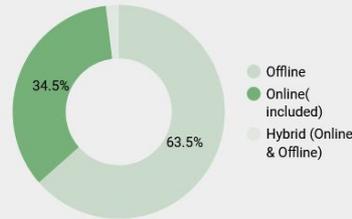
88

Layanan Terkait Lembaga Lain

44

Jumlah OPD

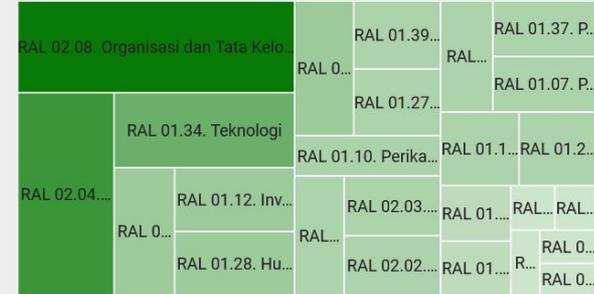
25



### Referensi Arsitektur Level-1



### Referensi Arsitektur Level-2



# Versi 1.0



## Referensi Domain Proses Bisnis



### Referensi Arsitektur Level-1

Jumlah Probis

886

Jumlah OPD

42

RAB 09. Pemerintahan Umum

RAB 02. Ekonomi dan Industri

RAB 06. Pendidikan dan Tena...

RAB 07. Lingkungan dan Su...

RAB 04. Perlindungan Sosial dan...

RAB 03. Pembangunan...

RAB 08...

RAB 05...

null

# Versi 2.0

Optimalisasi  
Pendefinisian  
Probis: 57%



## Referensi Domain Proses Bisnis



### Referensi Arsitektur Level-1

Jumlah Probis

471

Jumlah OPD

42

RAB 09. Pemerintahan Umum

RAB 06. Pendidikan dan Te...

RAB 02. Ekonomi dan I...

RAB 04. Perlindungan...

RAB 07. Lingkungan d...

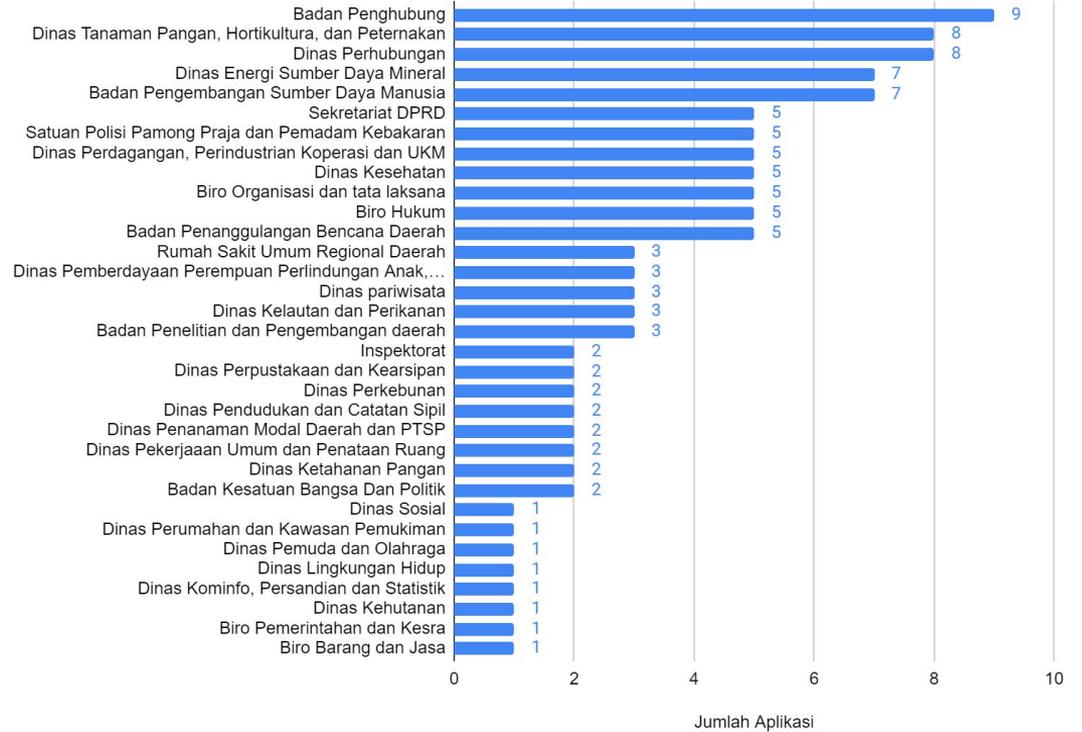
RAB 03. Pembang... R...

## Jumlah Aplikasi vs Satker/Unitkerja

113 Usulan  
Aplikasi dari 33  
OPD



Satker/Unitkerja



Domain Layanan

Domain Proses Bisnis

Domain Data

Domain Aplikasi

Peta Rencana

### Peta Rencana SPBE | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RPJMD / RPD

RKPD/Renja

Aktivitas

Contains

Muatan

Kelompok Muatan

Tahun Pelaksanaan

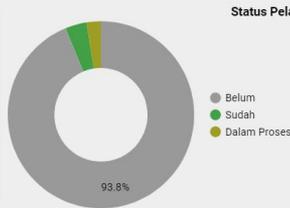
Status Pelaksanaan

#### Status Muatan Peta Rencana

Jumlah Aktivitas

**161**

Belum **151** Dalam Proses **4** Sudah **6**

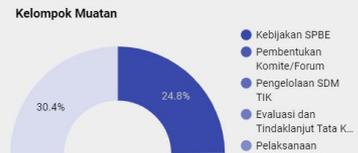


#### Detil Komposisi Peta Rencana

7 Muatan Peta Rencana

Manajemen

Keamanan Informasi

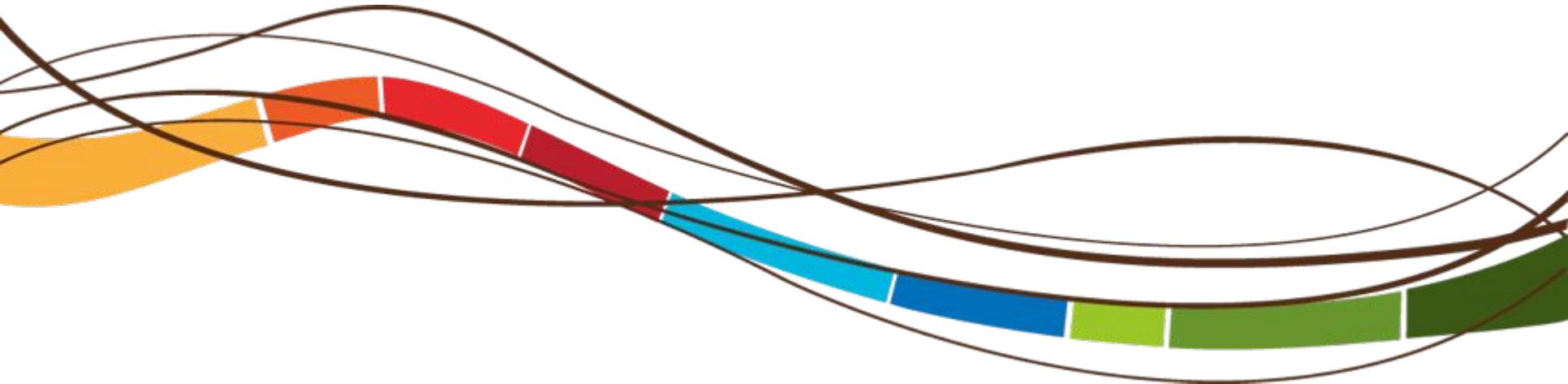


Aktivitas per UIC

UIC (OPD Pelaksana)	Jumlah
1. Dinas Komunikasi dan Informatika & Biro. Hukum	80
2. Dinas Komunikasi dan Informatika	64
3. Inspektorat	5
4. OPD Terkait	4



# Lingkup Integrasi Dalam Keterpaduan Layanan Digital



## Konsep Interoperabilitas

- Aplikasi yang ada akan dipertahankan, data yang dipertukarkan.
- *Write once read anywhere* → mencegah redudansi dan inkonsistensi
- *Single digital identity*: otentikasi dan otorisasi dalam Framework
- Interoperabilitas organisasi, semantik, dan teknis
- Tata Kelola Data



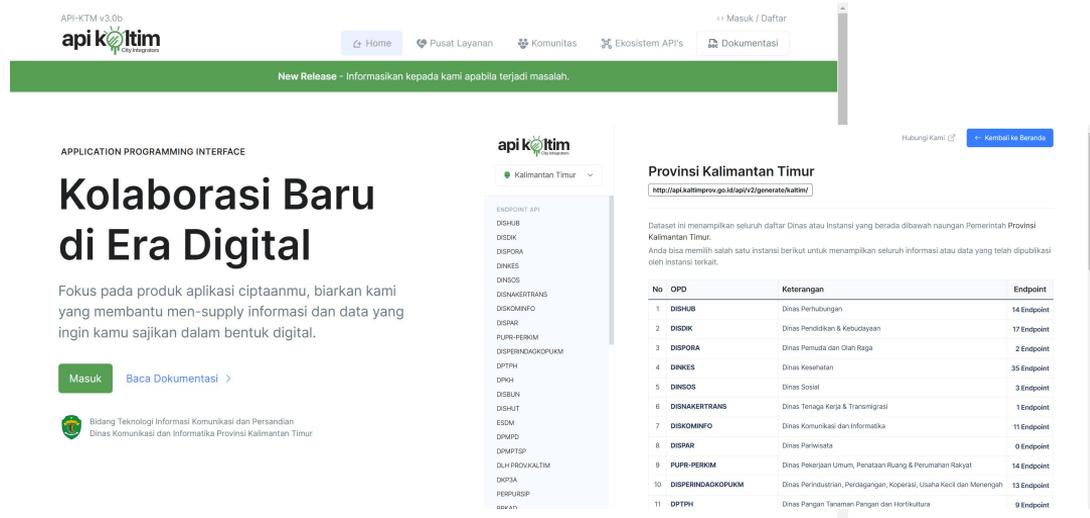
## Prinsip Interoperabilitas Data



- Panduan kurasi aplikasi lama: perlu bersih-bersih aplikasi yang terlalu banyak
- Panduan filter inisiatif aplikasi baru
- Knowledge acquisition and retention: *in house* **not** *outsource*
- *Start small, scale fast*. Mulai dari kecil, baru diperbesar kemudian
  - Interoperabilitas data mikro (tematik data)
  - Data warehouse - OLAP (Online Analytical Processing)

# Struktur Perubahan Interoperabilitas

- Informasikan sedini mungkin perubahan yang terjadi di lingkup pemda dan eksternal
- Perbaharui dan reviu berkala standar yang digunakan
- Dokumentasikan dalam bentuk yang mudah diakses dan didistribusikan kepada para pihak terkait dan berkepentingan



API-NTM v3.0b  
api k o t i m  
KALIMANTAN TIMUR

Home Pusat Layanan Komunitas Ekosistem API's Dokumentasi

New Release - Informasikan kepada kami apabila terjadi masalah.

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

## Kolaborasi Baru di Era Digital

Fokus pada produk aplikasi ciptaanmu, biarkan kami yang membantu men-supply informasi dan data yang ingin kamu sajikan dalam bentuk digital.

Masuk Baca Dokumentasi >

Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian  
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

api k o t i m  
Kalimantan Timur

ENDPOINT API

- DISHUB
- DISDK
- DISPORA
- DINKES
- DINSOS
- DISNAKERTRANS
- DISKOMINFO
- DISPAR
- PUPR-PERKUM
- DISPERINDAGKOPUKM
- DPTPI
- DPKH
- DBBLN
- DBSUT
- ESDM
- EMPD
- DMPTSP
- DLH-PROKALTIM
- DKPDA
- PERPUSP
- BEKAS

Provinsi Kalimantan Timur

<http://api.kaltimprov.go.id/api/v2/generatorkaltim/>

Dataset ini menampilkan seluruh daftar Dinas atau Instansi yang berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.  
Anda bisa memilih salah satu instansi berikut untuk menampilkan seluruh informasi atau data yang telah dipublikasi oleh instansi terkait.

No	OPD	Keterangan	Endpoint
1	DISHUB	Dinas Perhubungan	14 Endpoint
2	DISDK	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	17 Endpoint
3	DISPORA	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2 Endpoint
4	DINKES	Dinas Kesehatan	35 Endpoint
5	DINSOS	Dinas Sosial	2 Endpoint
6	DISNAKERTRANS	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	1 Endpoint
7	DISKOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informatika	11 Endpoint
8	DISPAR	Dinas Pariwisata	0 Endpoint
9	PUPR-PERKUM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Penunahan Rakyat	14 Endpoint
10	DISPERINDAGKOPUKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13 Endpoint
11	DPTPI	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	9 Endpoint



# Lingkup Area

## Interoperabilitas Organisasi

Koordinasi dan penyesuaian proses bisnis dan informasi yang mencakup batas intra dan antar organisasi.

- Policy dan regulasi apa yang masih diperlukan?
- Insentif nya apa?
- Siapa yang berwenang melakukan implementasi interoperabilitas, diskominfo?
- Siapa yang membiayai?
- Proses bisnisnya kompatibel

Contoh : Kamus Data bersama (metadata arsitektur data dan informasi, menyiapkan RACI Board



# Lingkup Area

## Interoperabilitas Semantik

Memastikan bahwa makna tepat dari data yang dipertukarkan dapat dimengerti oleh aplikasi atau orang yang menerima data.

Tujuan dari semantic interoperability:

- Mencegah terjadinya kata berbeda yang merujuk makna sama (*sinonim*)
- Mencegah terjadinya kata sama merujuk makna yang berbeda (*ambiguity*)
- Makna dari kata bisa dipertukarkan antar mesin

Contoh: *shared vocabulary*, human2human



# Lingkup Area

## Interoperabilitas Teknis

Masalah teknis menghubungkan sistem informasi untuk pertukaran data atau fungsionalitas.

Syntax atau format, alternatif:

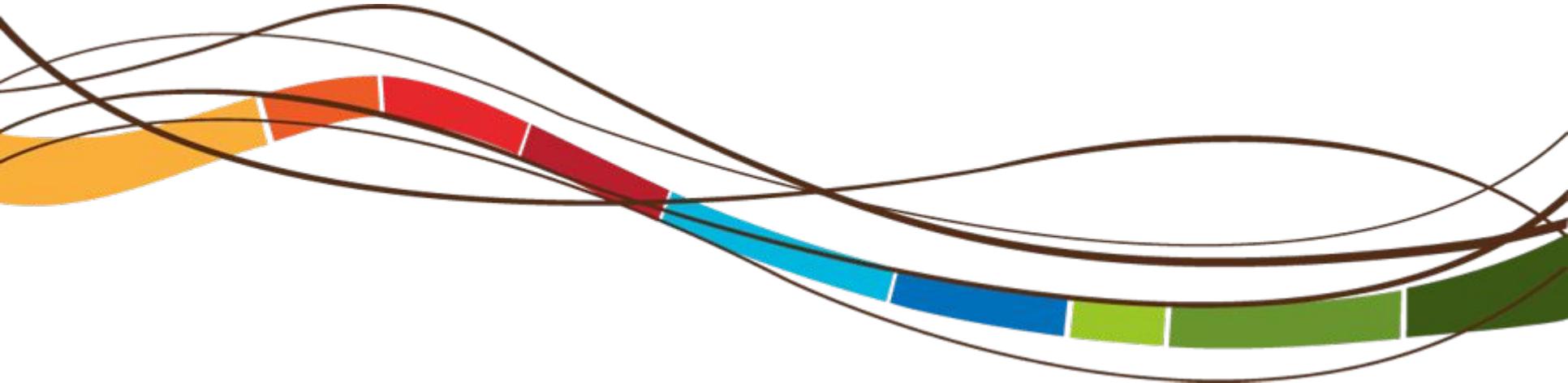
- CSV
- XML
- **JSON**

*Pattern* pertukaran data:

- *File sharing*
- *Read database*
- *Web Service*
- *Publish/Subscribe*

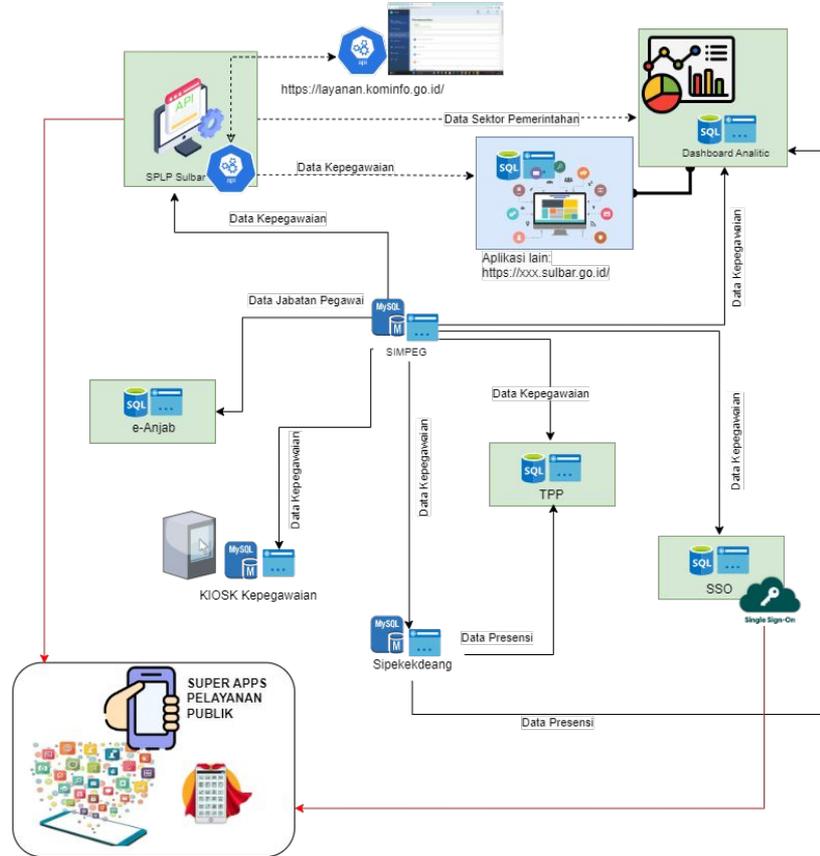


# Skema Integrasi [Usulan]



## Core Integrasi [Kepegawaian]

Sektor	Pemerintahan Umum
Urusan	Aparatur Negara



### Keterangan:

- Kotak Hijau**: Layanan Elektronik blm ada
- Kota Biru**: semua layanan elektronik (baik adm pemerintahan maupun pelayanan publik)
- Garis merah**: integrasi super apps
- Garis putus-putus**: integrasi SPL

OPD Terlibat (Tahap-1)  
Dinas Kominfo  
BPSDM

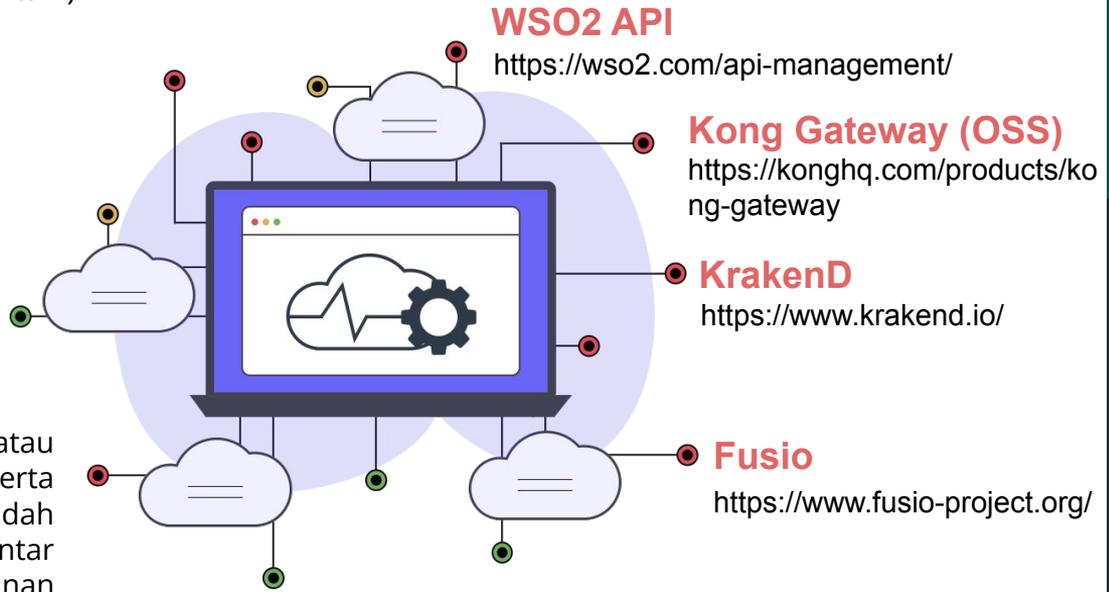


# SPLP

(Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan **perangkat integrasi untuk melakukan pertukaran layanan SPBE**

Pemanfaatan API Manager atau Enterprise Service Bus serta service directory yang sudah dimiliki dan dioperasikan antar layanan



## Tujuan:

memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE yang diselenggarakan di internal maupun berkolaborasi secara vertikal dan horizontal



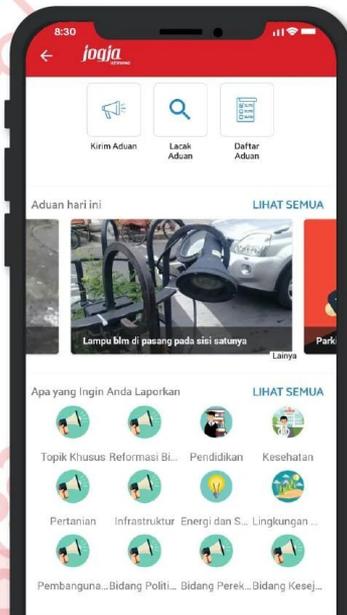


# SuperApps

Nikmati kemudahan akses  
Pengaduan Online dalam satu aplikasi



Terintegrasi Lapor SP4N  
Apa yang anda laporkan, pasti tersampaikan



Jogja Istimewa & E-Lapor DIY  
Kini bersinergi menjadi satu

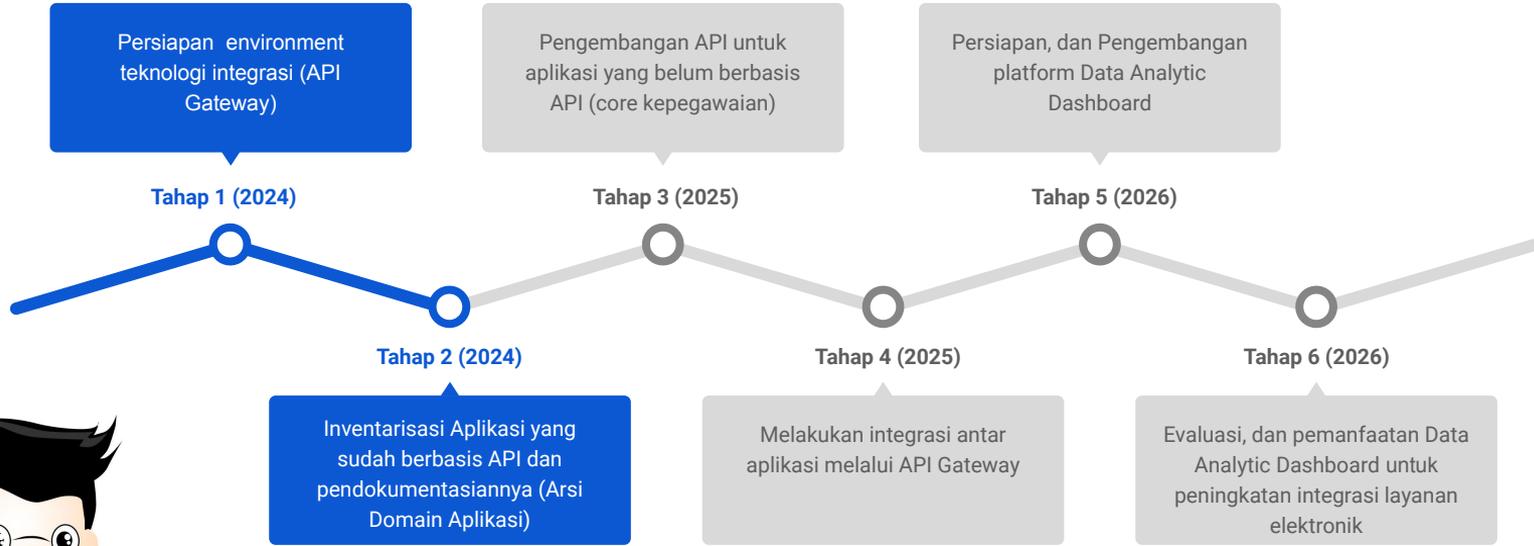


# Usulan Mekanisme Integrasi \*Nama bidang urusannya disesuaikan

No	Kegiatan	URAIAN PROSEDUR							Ket		
		Pelaksana					Mutu Baku				
		OPD Pemohon	Kabid Informatik	Technical Support	Kasi Sistem Informasi	Kadis Komunikasi dan Informatika	Kelengkapan	Waktu		Output	
	Mengajukan surat permohonan untuk integrasi sistem informasi								Surat Permohonan		Surat ditujukan kepada Kepala Dinas
1	Melakukan pembahasan kebutuhan integrasi sistem informasi										
2	Apakah integrasi sistem informasi disetujui? a. Jika ya, maka lanjut ketahap berikutnya b. Jika tidak, maka dilakukan penolakan dengan disertai alasannya								Formulir persetujuan integrasi sistem informasi		
3	Melakukan proses integrasi sistem informasi										
4	Melakukan pengujian integrasi sistem informasi										
5	Apakah integrasi sistem informasi sudah memenuhi kelayakan? a. Jika ya, maka lanjut ketahap berikutnya b. Jika tidak, maka kembali ke langkah nomor 3										
6	Melakukan penyerahan sistem informasi yang terintegrasi kepada OPD Pemohon										



# Peta Rencana Aksi Integrasi (usulan)



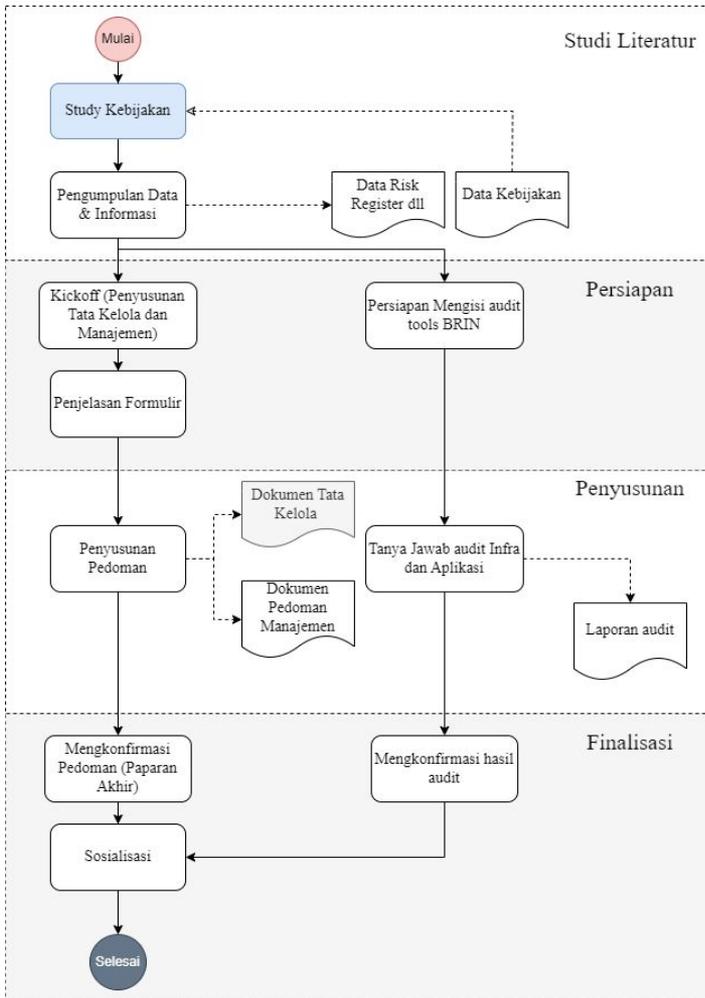
# Terima Kasih

Mari Bergerak untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui SPBE



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**CfDS**  
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY



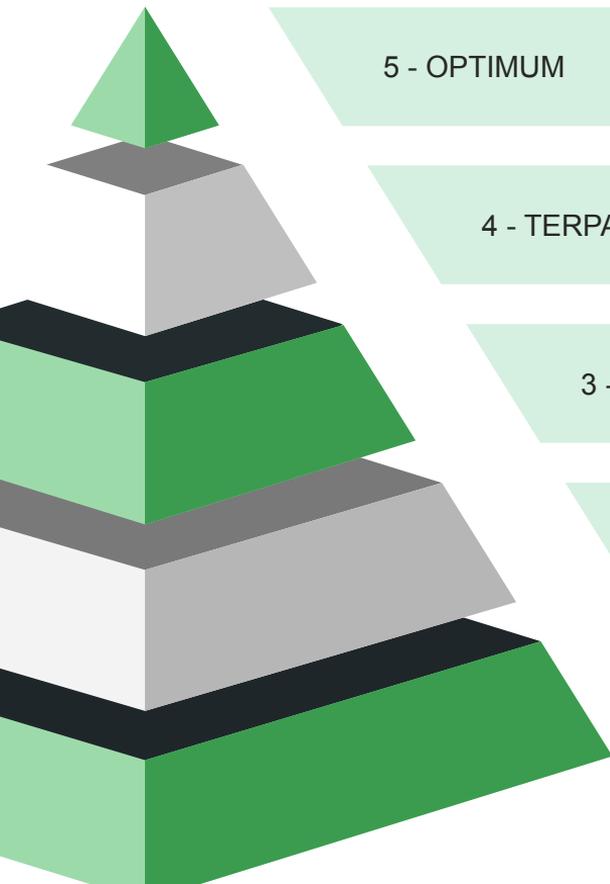
### Kebutuhan Data:

Kebijakan terkait SPIP, Manajemen Risiko  
Kebijakan terkait Manajemen Data, Satu Data  
Dokumen RKA, SOP di Lingk Dinas Kominfo  
dan Kebijakan internal yang disusun

# PEMENUHAN KRITERIA UMUM

## ASPEK MANAJEMEN

(SEDERHANA)



5 - OPTIMUM

DILAKUKAN **PENINGKATAN KUALITAS SECARA BERKESINAMBUNGAN** BERDASARKAN HASIL REVIU/EVALUASI SPBE

4 - TERPADU & TERUKUR

KEGIATAN **REVIU/EVALUASI** PADA SETIAP MANAJEMEN SPBE

3 - TERDEFINISI

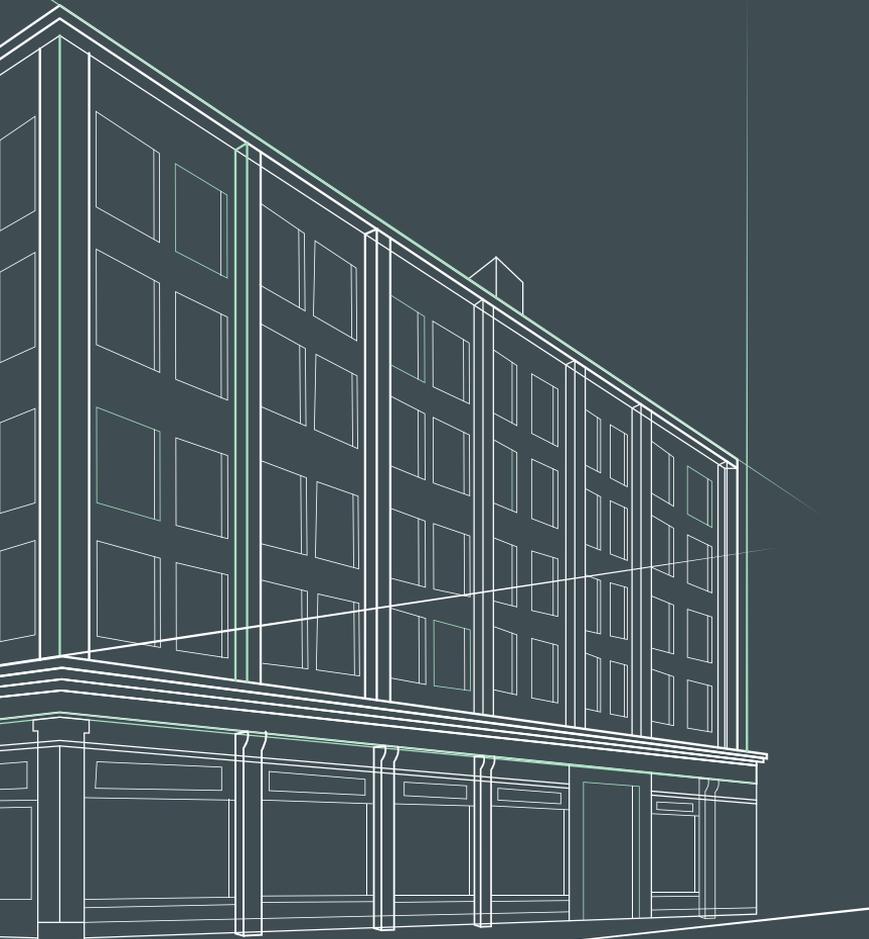
DENGAN **MENGGUNAKAN PEDOMAN**, DITERAPKAN PADA **SEMUA** RUANG LINGKUP

2 - TERKELOLA

DENGAN **PERENCANAAN**, NAMUN **BELUM MENGGUNAKAN PEDOMAN**, DITERAPKAN HANYA PADA **SEBAGIAN** RUANG LINGKUP

1 - RINTISAN

DILAKSANAKAN **TANPA PERENCANAAN**



# Pemenuhan Kriteria

## INDIKATOR 21

Penerapan Manajemen Risiko





## Area Dampak Risiko SPBE:

1. **Finansial**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan;
2. **Reputasi**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan;
3. **Kinerja**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE;
4. **Layanan Organisasi**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan;
5. **Operasional dan Aset TIK**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan aset TIK;
6. **Hukum dan Regulasi**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
7. **Sumber Daya Manusia**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental

## Kategori Risiko SPBE meliputi:

1. Rencana Induk SPBE Nasional
2. Arsitektur SPBE
3. Peta Rencana SPBE
4. Proses Bisnis
5. Rencana dan Anggaran
6. Inovasi
7. Kepatuhan terhadap Peraturan
8. Pengadaan Barang dan Jasa
9. Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem
10. Data dan Informasi
11. Infrastruktur SPBE
12. Aplikasi SPBE
13. Keamanan SPBE
14. Layanan SPBE
15. SDM SPBE
16. Bencana Alam

# INDIKATOR 21

## Penerapan Manajemen Risiko SPBE

(1/2)

### Level 1

IPPD **belum** atau **sudah** menerapkan Manajemen Risiko SPBE **tanpa program kegiatan yang terencana.**

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf / rancangan** penerapan Manajemen Risiko SPBE
- **Notulensi/laporan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Risiko SPBE**, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Risiko SPBE, atau dokumentasi aktivitas penyusunan Manajemen Risiko SPBE

### Level 2

IPPD menerapkan Manajemen Risiko SPBE **sesuai dan selaras** dengan program kegiatan yang tercantum dalam **Peta Rencana SPBE**, namun pelaksanaannya **belum mengacu pedoman** yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- Perencanaan program kerja penerapan Manajemen Risiko SPBE tertuang di dalam dokumen **Peta Rencana SPBE** yang **masih berlaku** dan **terdokumentasi secara formal**
- Dokumen penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE, namun penerapannya **belum mengacu** pada **pedoman** yang telah ditentukan

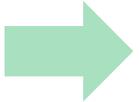
### Level 3

IPPD telah **menerapkan** Manajemen Risiko SPBE **sesuai** dengan **pedoman** Manajemen Risiko SPBE yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Risiko SPBE yang menguraikan **seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman** Manajemen Risiko yang telah ditentukan dan terdokumentasi secara formal (form 2.1-4.0 Manris KEMENPANRB)

Level 4-5



# INDIKATOR 21

## Penerapan Manajemen Risiko SPBE

(2/2)

### Level 4

IPPD telah menyusun kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah, serta telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Risiko SPBE yang **menguraikan seluruh pemenuhannya** sesuai dengan standar Manajemen Risiko yang telah ditentukan dan **terdokumentasi secara formal**
- **Menetapkan Kebijakan Strategis** Peningkatan Budaya Sadar Risiko SPBE di lingkungan IPPD yang **ditetapkan KMR/Tim Koordinasi SPBE** kepada Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah
- Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen Risiko SPBE yang **dilakukan secara berkesinambungan**
- Hasil evaluasi/reviu yang **berisi** konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen Risiko SPBE (**opsional**)

### Level 5

IPPD melakukan **perbaikan penerapan** Manajemen Risiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil **reviu dan evaluasi secara berkesinambungan**

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan **hasil evaluasi** dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko
- Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang **sebelumnya**, dan yang berisi **penyempurnaan** penerapan Manajemen Risiko SPBE

Gambaran  
Penerapan

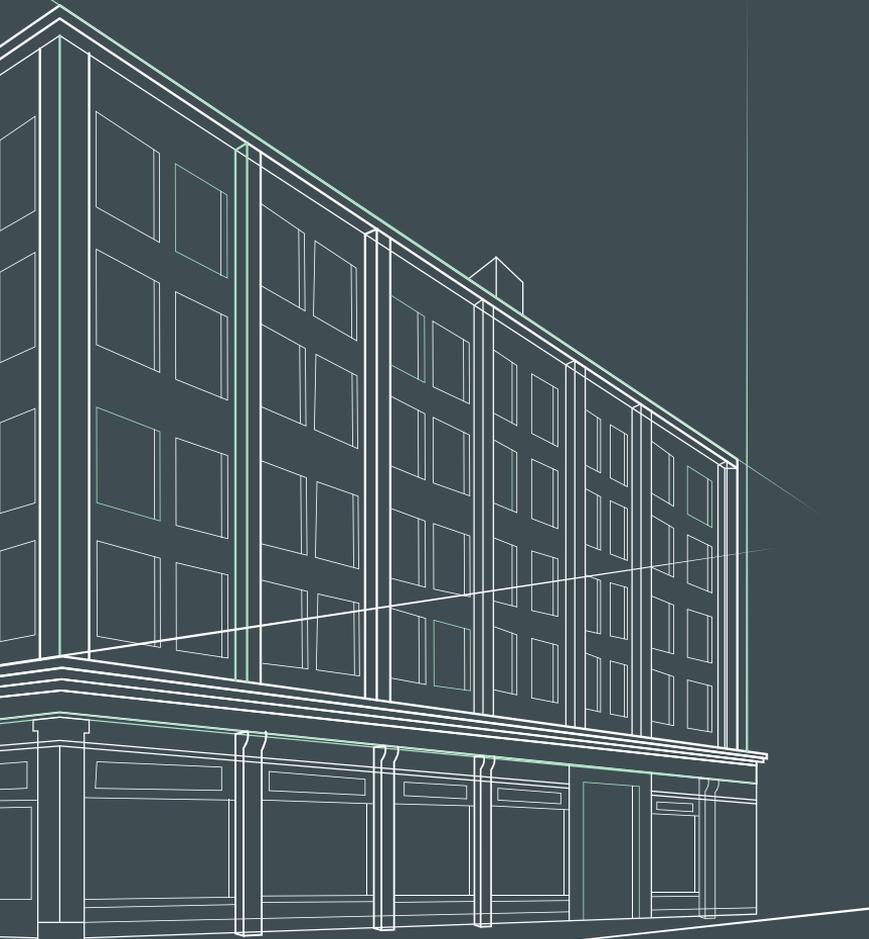


## 8 Penetapan Kriteria Risiko SPBE

### Contoh Pengisian Formulir 2.8.B Kriteria Dampak Risiko SPBE (TIK)

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Layanan Organisasi	Positif	mempercepat layanan <20% dari jam operasional harian	mempercepat layanan 20% s.d <40% dari jam operasional harian	mempercepat layanan 40% s.d <60% dari jam operasional harian	mempercepat layanan 60% s.d 80% dari jam operasional harian	mempercepat layanan > 80 % dari jam operasional harian
	Negatif	gangguan layanan <20% dari jam operasional harian	gangguan layanan 20% s.d <40% dari jam operasional harian	gangguan layanan 40% s.d <60% dari jam operasional harian	gangguan layanan 60% s.d 80% dari jam operasional harian	gangguan layanan > 80 % dari jam operasional harian

Link Formulir Manajemen Risiko: <https://s.id/manrisspbe>



# Pemenuhan Kriteria

## INDIKATOR 23

Penerapan Manajemen Data



1

### Definisi SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. (Pasal 1 Ayat 1)



### Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. (Pasal 1 Ayat 2)

2

3

### Tujuan

Menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. (Pasal 3 Ayat 1)



### Sasaran Manajemen Data SPBE (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah)

- a. memahami kebutuhan Data;
- b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
- c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
- d. memaksimalkan penggunaan Data dan memberikan hasil yang efektif

4

5

### Aktor dalam Manajemen SPBE

Produsen Data,  
Pembina Data,  
Wali Data

Pengelolaan Data

Pengguna Data



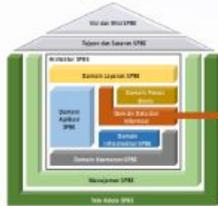
### Serangkaian proses pengelolaan Manajemen Data SPBE

- a. Arsitektur Data;
- b. Data Induk dan Data Referensi;
- c. Basis Data; dan
- d. Kualitas Data.

6

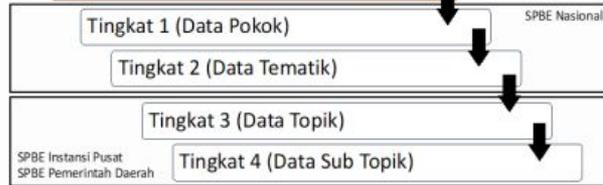
Kegiatan Manajemen Arsitektur Data (Permen PPN 16/2020) meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. reuiu.



## REFERENSI ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

### Struktur Arsitektur Data dan Informasi



Struktur Referensi

Taksonomi Referensi

Sumber: Referensi Arsitektur SPBE Nasional

Sektor Pemerintahan	Urusan Pemerintahan
RAD.01 - Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 - Data Pertahanan RAD.01.02 - Data Urusan luar negeri
RAD.02 - Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 - Data Industri RAD.02.02 - Data Perdagangan RAD.02.03 - Data Pertanian RAD.02.04 - Data Perkebunan RAD.02.05 - Data Peternakan RAD.02.06 - Data Perikanan RAD.02.07 - Data Badan usaha milik negara RAD.02.08 - Data Investasi RAD.02.09 - Data Koperasi RAD.02.10 - Data Usaha kecil dan menengah RAD.02.11 - Data Pariwisata
RAD.03 - Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 - Data Pekerjaan umum RAD.03.02 - Data Transmigrasi RAD.03.03 - Data Transportasi RAD.03.04 - Data Perumahan RAD.03.05 - Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal RAD.03.06 - Data Pertanahan RAD.03.07 - Data Kependudukan
RAD.04 - Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 - Data Kesehatan RAD.04.02 - Data Sosial RAD.04.03 - Data Pemberdayaan perempuan
RAD.05 - Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 - Data Hukum RAD.05.02 - Data Keamanan RAD.05.03 - Data Hak asasi manusia
RAD.06 - Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 - Data Pendidikan RAD.06.02 - Data Ketenagakerjaan RAD.06.03 - Data Ilmu pengetahuan RAD.06.04 - Data Teknologi RAD.06.05 - Data Pemuda RAD.06.06 - Data Olahraga
RAD.07 - Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.01 - Data Pertambangan RAD.07.02 - Data Energi RAD.07.03 - Data Kehutanan RAD.07.04 - Data Kelautan RAD.07.05 - Data Lingkungan hidup
RAD.08 - Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.01 - Data Agama RAD.08.02 - Data Kebudayaan
RAD.09 - Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 - Data Dalam negeri RAD.09.02 - Data Keuangan RAD.09.03 - Data Informasi RAD.09.04 - Data Komunikasi RAD.09.05 - Data Perencanaan pembangunan nasional RAD.09.06 - Data Aparatur negara RAD.09.07 - Data Sekretariat negara
RAD.10 - Data Pendukung Umum	RAD.10.01 - Data Kebijakan Pemerintah RAD.10.02 - Data Manajemen Kegiatan RAD.10.03 - Data Kewilayahan RAD.10.04 - Data Dukung Lainnya

sumber: BSSN

# DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

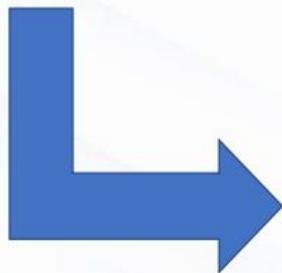
Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi (PermenPPN 16/2020) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyebarluasan; dan
- e. pembaruan.

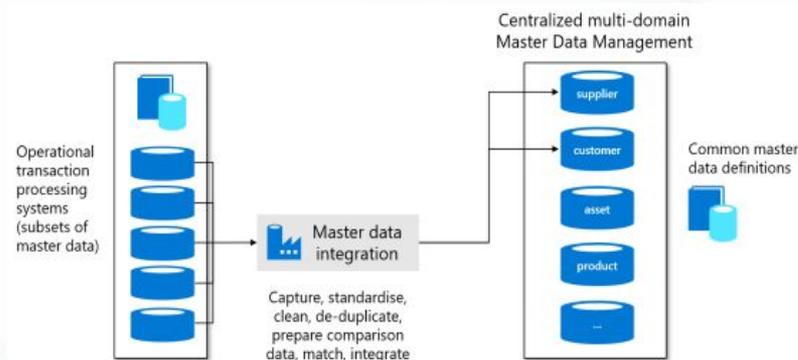


Bertujuan agar menyediakan Data yang:

- sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- menghindari duplikasi.



- Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat
- Walidata
- Koordinator Forum Satu Data Indonesia
- Dewan Pengarah Satu Data Indonesia
- Menteri





## BASIS DATA

Kegiatan Manajemen Basis Data (PermenPPN 16/2020) mencakup:

- mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
- mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional;
- melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- menyebarkan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia;
- membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
- merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.



Bertujuan agar:

- menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional;
- menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
- menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.





## KUALITAS DATA

Kegiatan Manajemen Kualitas Data (Permen PPN 16/2020) meliputi:

- mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- menentukan persyaratan kualitas Data;
- menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- menentukan matriks kualitas Data;
- menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.



Kegiatan Manajemen Kualitas Data dilaksanakan melalui tahapan:

- perencanaan;
- pemeriksaan; dan
- penilaian.



- Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat
- Walidata
- Tim Koordinasi SPBE atau unit kerja di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE



**Penilaian Kualitas Data** dilaksanakan untuk menilai **kinerja Produsen Data dan Walidata** dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.



## ● Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 9

Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data

### Pasal 9

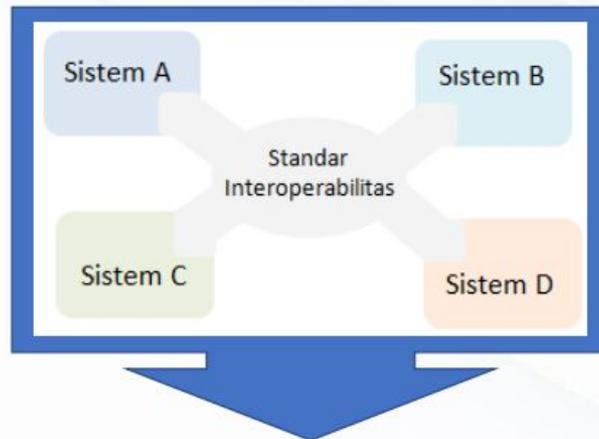
(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

(2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:

a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



Kualitas Data yang dibagipakaikan dalam hal konsistensi dari:

a) Bentuk/sintaks, contoh:

- Tanggal lahir dinyatakan dalam bentuk tanggal.
- Alamat dinyatakan dalam bentuk rangkaian nama lokasi serta nomor-nomor yang menjelaskan keberadaan dari objek hukum tertentu.

b) Struktur/skema/komposisi, contoh:

- data tanggal dalam format yyyyymmdd dimana yyyy adalah 4 angka tahun, mm adalah 2 angka bulan, dan dd adalah 2 angka tanggal.
- Alamat terdiri dari nama jalan, nama kota, nama provinsi, nama negara.

c) Artikulasi/semantik, contoh:

- Tanggal lahir adalah waktu yang tercatat terkait kelahiran seseorang pada instansi yang memiliki kewenangan.
- Alamat merupakan nama lokasi keberadaan dari seseorang, gedung atau objek benda lain.

# Manajemen Data

## Cakupan Penerapan Manajemen Data

- **Arsitektur data** yang dirancang mempertimbangkan solusi untuk mewujudkan satu data BPS melalui implementasi repositori data terpusat sebagai single source of truth
- Setiap data yang disimpan di **repositori data terpusat** terelasi dengan metadata untuk memudahkan penggunaan dan integrasi data
- **Kode referensi dan data induk** berasal dari satu sumber yang akurat dan terpercaya. Struktur kode referensi dan data induk mengikuti struktur model informasi yang sesuai dengan kebutuhan BPS
- **Pengelolaan basis data** mencakup dukungan terhadap basis data termasuk siklus hidup data serta dukungan terhadap teknologi basis data
- Implementasi basis data disesuaikan dengan **arsitektur data** yang telah dirancang dan ditetapkan

# Manajemen Data

## Cakupan Penerapan Manajemen Data

- Dimensi **kualitas data** dari tiap-tiap aspek tersebut ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan juga hasil kajian terhadap best practices terkait penjaminan kualitas data statistik
- Penerapan **quality gates** di setiap tahapan proses bisnis statistik perlu dilakukan sebagai peringatan dini terhadap kesalahan data maupun prosedur dalam proses produksi statistik
- Setiap layanan **interoperabilitas data** yang dilakukan oleh BPS baik untuk internal maupun eksternal harus didahului dengan identifikasi kebutuhan dan mempertimbangkan penggunaan kembali layanan (services) serta integrasi beberapa layanan (services)
- **Arsitektur interoperabilitas data** terdokumentasi dengan jelas yang sekurang-kurangnya berisi informasi sumber, metadata, kamus data, format data, kode akses, alamat akses, dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga kekiniannya

# INDIKATOR 23

## Penerapan Manajemen Data

(1/2)

### Level 1

IPPD **belum** atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data **tanpa program** kegiatan yang terarah dan **terencana**

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf**/rancangan penerapan Manajemen Data
- Notulensi/laporan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas penyusunan Manajemen Data

### Level 2

IPPD **sudah** menerapkan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam **Peta Rencana SPBE**, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- Perencanaan program kerja penerapan Manajemen Data SPBE Informasi tertuang di dalam **dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal**
- Dokumen penerapan kegiatan Manajemen Data SPBE, namun penerapannya **belum mengacu** pada **pedoman** yang telah ditentukan

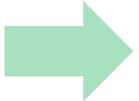
### Level 3

IPPD telah **menerapkan** Manajemen Data sesuai dengan pedoman Manajemen Data yang berlaku yang memuat seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Manajemen Data yang **selaras dengan arah dan perencanaan programnya** yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap **seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data**

Level 4-5



# INDIKATOR 23

## Penerapan Manajemen Data

(2/2)

### Level 4

IPPD telah menyusun **strategi Keamanan Data** yang ditetapkan oleh Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE IPPD yang diterapkan kepada **seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah** serta telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Manajemen Data yang menguraikan **seluruh pemenuhannya sesuai dengan standar Manajemen Data** yang telah ditentukan dan terdokumentasi secara formal
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Data yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE kepada Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah. **Sebagai contoh**, telah ada **kebijakan Manajemen Keamanan Data** sebagai output dari forum satu data/tim koordinasi SPBE (dalam bentuk dokumentasi formal)
- Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen Data yang **dilakukan secara berkesinambungan**
- Hasil **evaluasi/reviu** yang **berisi** konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen Data (**opsional**)

### Level 5

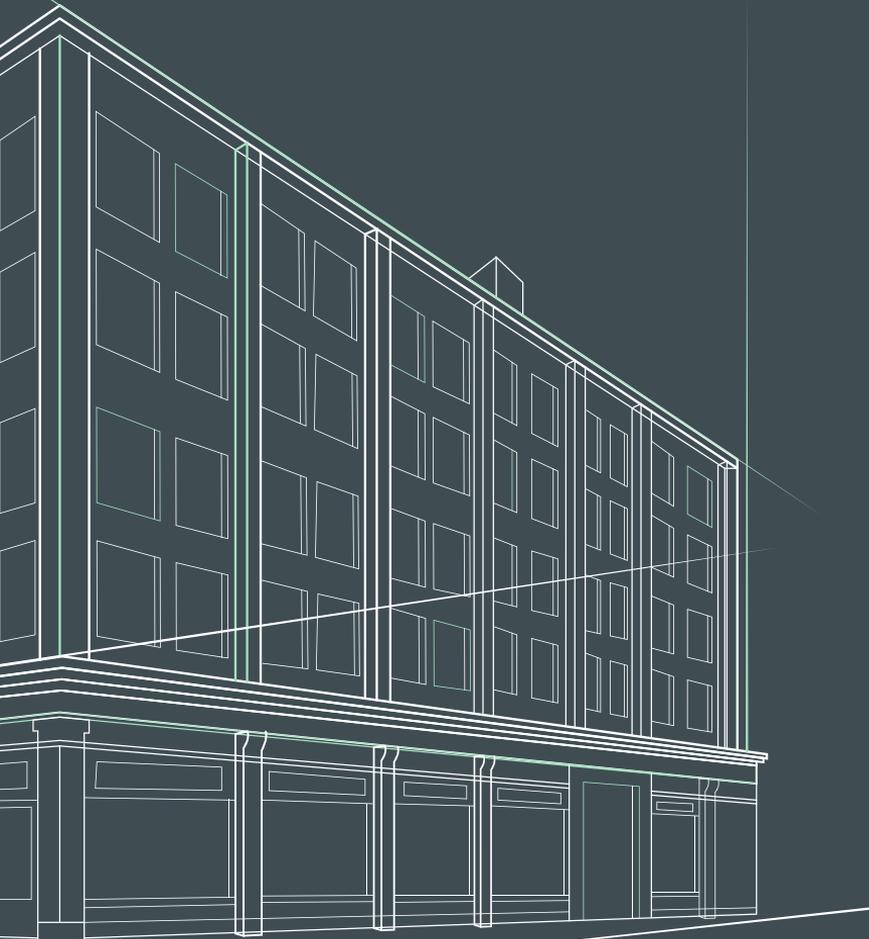
IPPD melakukan **perbaikan** penerapan Manajemen Data sebagai tindak lanjut atas **hasil reviu** dan evaluasi secara berkesinambungan

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan **hasil evaluasi** dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data
- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang **sebelumnya**, dan yang berisi **penyempurnaan** penerapan Manajemen Data

Gambaran  
Penerapan



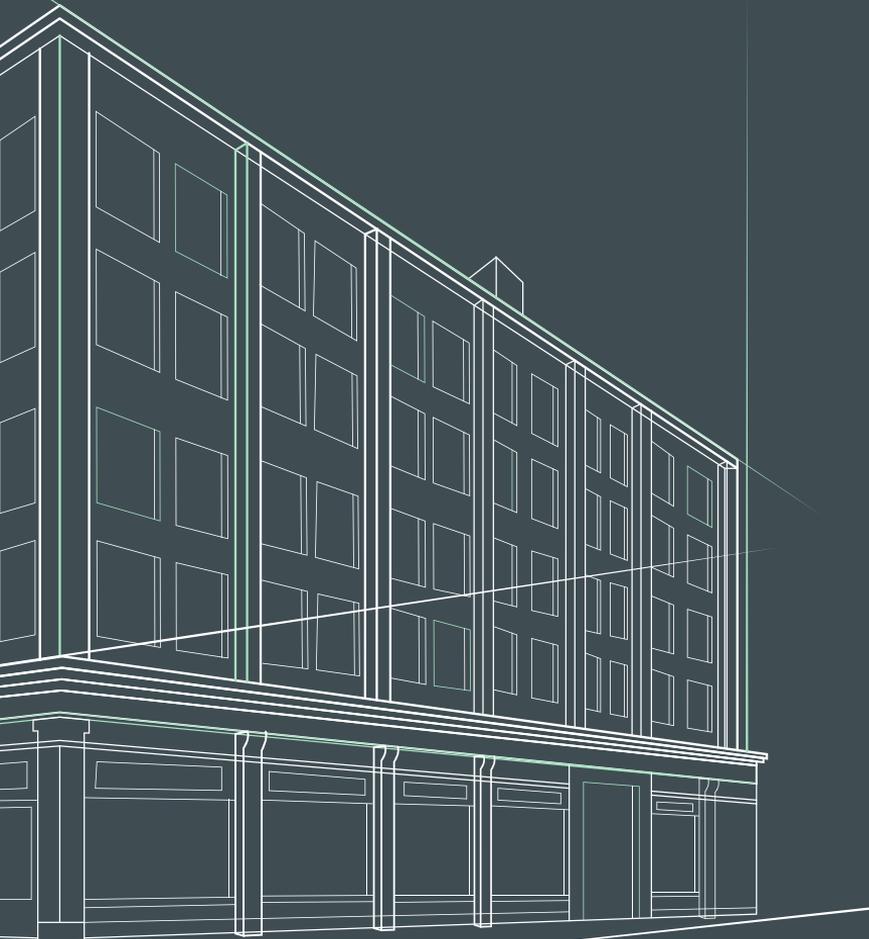


# Pemenuhan Kriteria INDIKATOR 29

Audit Infrastruktur SPBE

## Ruang Lingkup

- **Perencanaan Program Kerja dan Kegiatan Audit Infrastruktur** tertuang pada **Peta Rencana SPBE**
- Audit infrastruktur SPBE dilakukan **sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (BRIN)**.
- **Muatan pemeriksaan Audit Infrastruktur TIK:**
  - Penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE
  - Infrastruktur SPBE
  - Kinerja infrastruktur SPBE yang dihasilkan
  - Aspek infrastruktur SPBE lainnya
- Audit infrastruktur SPBE Nasional dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh BRIN.
- Audit infrastruktur SPBE IPPD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh IPPD, berkoordinasi dengan BRIN.



# Pemenuhan Kriteria INDIKATOR 30

Audit Aplikasi SPBE

## Ruang Lingkup

- **Perencanaan Program Kerja dan Kegiatan Audit Aplikasi** tertuang di dalam **Peta Rencana SPBE**.
  - Audit Aplikasi SPBE dilakukan sesuai dengan **standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE (BRIN)**.
  - Audit Aplikasi SPBE **terdiri atas**:
    - Audit Aplikasi Umum
    - Audit Aplikasi Khusus
  - Audit Aplikasi Umum: sebaiknya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun oleh BRIN
  - Audit Aplikasi Khusus: sebaiknya dilakukan 1 kali dalam 2 tahun oleh IPPD, dengan melakukan koordinasi dengan BRIN.
-

# PELAKSANA AUDIT SPBE, Objek Audit dan Domain Audit

1. Pendaftaran Latik Terakreditasi
2. Pendaftaran Auditor SPBE

Amanat **Perpres 95 2018** dan Amanat **Permenkominfo Kebijakan Umum Pelaksanaan Audit TIK**

**PermenPAN-RB 59 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE**

## Amanat Perpres 95 2018 SPBE

AUDIT TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana AUDIT TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana AUDIT TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

AUDIT TIK berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK

Kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK diatur dengan PERMEN KOMINFO  
Auditor adalah pegawai tetap Latik Terakreditasi

## DOMAIN AUDIT SPBE (Aplikasi dan Infrastruktur):

1. Tata Kelola
2. Manajemen (8 macam Manajemen)
3. Fungsional dan Kinerja

Latik : Lembaga Pelaksana Audit TIK  
Latik Pemerintah = BPPT  
Latik Terakreditasi = Swasta

IPPD = Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah  
IP 94 buah PD = 564 buah

## Peran BPPT sebagai

- Regulator (Perban BPPT)
- Latik Pemerintah ( warna biru )
- Pendaftaran Latik Terakredits dan Pendaftaran Auditor SPBE

Sumber: OR-PPT BRIN

## AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

**Peraturan BPPT :**  
STANDAR dan TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

**PELAKSANA :**  
Latik Pemerintah  
BPPT

**PELAKSANA :**  
IPPD : Auditor Internal  
atau  
IPPD : Latik Terakredits

**OBJEK AUDIT**  
INFRASTRUKTUR NASIONAL SPBE

**OBJEK AUDIT**  
Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD)

Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh BPPT

Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh IPPD

**Terdiri dari :**

1. Pusat Data Nasional
2. Jaringan Intra Pemerintah
3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- Proses Bisnis
- Arsitektur Infrastruktur
- Arsitektur SDM

## AUDIT APLIKASI SPBE

**Peraturan BPPT :**  
STANDAR dan TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT APLIKASI SPBE

Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE

**PELAKSANA :**  
Latik Pemerintah  
BPPT

**PELAKSANA :**  
IPPD : Auditor Internal  
atau  
IPPD : Latik Terakredits

**OBJEK AUDIT**  
Aplikasi Umum SPBE

**OBJEK AUDIT**  
Aplikasi Khusus SPBE

Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh BPPT

Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh IPPD

- 1 Pengaduan Pelayanan Publik
- 2 Kearsipan Dinamis
- 3 Kepegawaian
- 4 Perencanaan
- 5 Penganggaran
- 6 Pengadaan barang dan jasa
- 7 Akuntabilitas kinerja
- 8 Pemantauan dan evaluasi

- Proses Bisnis
- Arsitektur Aplikasi
- Arsitektur Data dan Informasi
- Arsitektur SDM



# Penggunaan Tools Audit

audit-tools-spbe.brin.go.id/webaudit/

Penda... PANRB Smart eReport PANRB Google Calendar ... Bahan Paparan Asd... Monev SPBE Monitoring Pelaksa... Mail Menpan Schedule Asdep SP... snlive1 - Twitch

**BRIN** BADA & RISET DAN INOVASI NASIONAL

HOME APA ITU SPBE AUDIT SPBE AUDITOR AUDITEE FAQ UNDUH SERVICE DESK LOGIN ISI SURVEY

## Unduh Materi

Materi terkait Audit SPBE dapat diunduh pada link di bawah ini :

1. Video Pembudayaan Audit TIK SPBE
2. Video Panduan Penggunaan Auditor / User Manual Auditor
3. Video Panduan Penggunaan Auditee / User Manual Auditee
4. Video Panduan Audit Tools Per Tahapan
5. FAQ Penggunaan Audit Tools
6. Prosedur untuk Mendapatkan Akun Audit Internal SPBE
7. Contoh SK Tim Audit TIK SPBE Internal
8. Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE
9. Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur SPBE
10. Peraturan Menteri KOMINFO No. 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK
11. Rancangan Peraturan BPPT (BRIN) tentang Standar dan Tatacara Audit Infrastruktur dan Aplikasi ver 4
12. Rancangan Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE
13. Video Sosialisasi Pelaksanaan Audit TIK Internal SPBE 2022
14. Materi Sosialisasi Pelaksanaan Audit TIK Internal SPBE 2022

### Kriteria audit Infrastruktur:

<https://drive.google.com/file/d/1eh6Lgzb84p5KFZUYy6nNu0Ao8fqSTKPk/view>

### Kriteria audit Aplikasi:

[https://drive.google.com/file/d/1UKgsNuJM3uA\\_KvJmFF2XXoky1tWHX9Jt/view](https://drive.google.com/file/d/1UKgsNuJM3uA_KvJmFF2XXoky1tWHX9Jt/view)

# Terima Kasih

Tetap Semangat Para Pejuang SPBE



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**CfDS**  
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY